

DAMPAK BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN TERHADAP KESEJAHTERAAN KELUARGA DI DESA TERTINGGAL (STUDI KASUS PADA DESA TANGLAPUI KECAMATAN ALOR TIMUR KABUPATEN ALOR)

The Impact of the Family Hope Program Assistance on Family Welfare in Underdeveloped Villages (A Case Study in Tanglapui Village, East Alor District, Alor Regency)

Junianto Yosepus Mokoni^{1,a)}, Aldarine Molidya^{2,b)}, Cicilia A. Tungga^{3,c)}

^{1,2,3}) Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

Koresponden : ^{a)} juniantomokoni666@gmail.com, ^{b)} aldarine.molidya@staf.undana.ac.id,
^{c)} cicilia.tungga@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kesejahteraan keluarga di Desa Tanglapui, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan yang terdiri dari pemerintah desa, pendamping PKH, penerima PKH, serta tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Desa Tanglapui telah menyentuh keluarga miskin dan memberikan manfaat berupa peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rumah tangga. Namun, efektivitas program masih terkendala oleh ketergantungan penerima bantuan serta permasalahan ketepatan sasaran akibat data yang kurang valid. Kesimpulan penelitian ini adalah PKH berperan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat miskin, tetapi masih membutuhkan evaluasi dan perbaikan dalam mekanisme pendataan dan pendampingan.

Kata Kunci : Program Keluarga Harapan, Kesejahteraan, Pelaksanaan PKH di Desa Tertinggal

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pertumbuhan penduduk harusnya disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik dari tingkat pendidikan, kesehatan maupun perekonomian. Kesejahteraan suatu negara bisa dilihat dari kesejahteraan ekonomi yang merupakan bagian dari kesejahteraan sosial (Nur Aeda, 2022). Berdasarkan Undang-undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sebagai perwujudan amanat dalam Undang Undang Dasar 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk itu pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah kesejahteraan. Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya adalah dengan

memberikan bantuan sosial sebagaimana yang telah dicanangkan adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 bahwa Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Manfaat PKH saat ini juga diarahkan untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan tujuan untuk mempertahankan kesejahteraan sosial mereka sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Program ini pertama kali diluncurkan di Indonesia pada tahun 2007. Program Keluarga Harapan adalah program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan dukungan finansial kepada kelompok yang membutuhkan, seperti ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, lanjut usia, dan penyandang disabilitas berat. PKH disalurkan dalam beberapa tahap dalam setahun, dengan jumlah bantuan yang bervariasi sesuai kategori penerima. Berikut adalah skema bantuan PKH berdasarkan kategori penerima:

Tabel.1.
Indeks Bantuan PKH

No	Kategori	Indeks/Tahun (Rp)	Indeks/Per 3 Bulan (Rp)
1	Ibu Hamil	3.000.000	750.000
2	Anak Usia Dini	3.000.000	750.000
3	Anak Sekolah SD	900.000	225.000
4	Anak Sekolah SMP	1.500.000	375.000
5	Anak Sekolah SMA	2.000.000	500.000
6	Lanjut Usia 70+	2.400.000	600.000
7	Disabilitas Berat	2.400.000	600.000

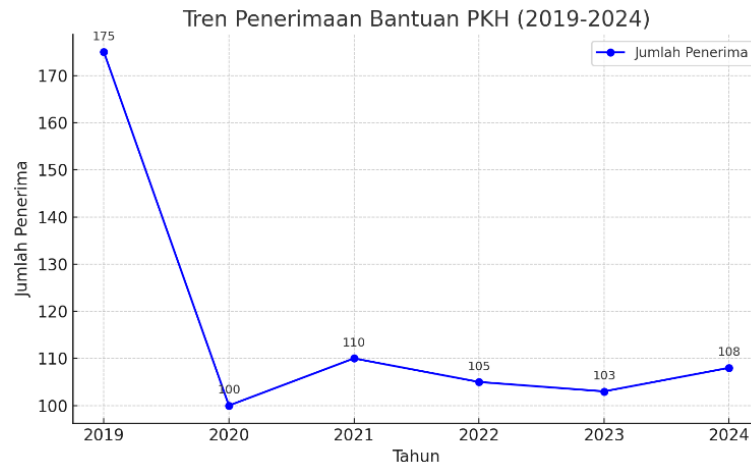
Sumber: Kementerian Sosial, 2025

Desa Tanglapui, yang terletak di Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor, merupakan salah satu desa yang masih berstatus tertinggal berdasarkan publikasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tahun 2024 (Kementerian Desa 2024). Desa ini menghadapi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi yang kompleks. Sebagian besar masyarakatnya bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan yang belum berkembang secara optimal. Kurangnya akses terhadap teknologi pertanian modern dan minimnya infrastruktur pendukung menyebabkan hasil produksi pertanian dan perkebunan masih rendah. Tingginya tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan menjadi permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Data BPS Kabupaten Alor tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di kabupaten Alor mencapai 41,89 ribu orang pada Maret 2024 (BPS kab Alor 2024).

Di Desa Tanglapui, Program Keluarga Harapan (PKH) telah menjadi salah satu bentuk intervensi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi Keluarga Penerima

Manfaat (KPM) dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Berikut adalah data jumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tanglapui, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor dari tahun 2019 hingga 2024. Data ini mencerminkan fluktuasi jumlah penerima bantuan akibat berbagai faktor, seperti perubahan kebijakan, evaluasi penerima, kondisi ekonomi keluarga, serta faktor sosial lainnya.



Sumber: Pendamping PKH Desa Tanglapui, 2025

Gambar 1.

Jumlah Penerima PKH di Desa Tanglapui

Namun, dalam implementasinya masih terdapat beberapa permasalahan yang muncul. Salah satunya adalah ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial, di mana sebagian penerima kurang memiliki inisiatif untuk meningkatkan taraf hidup mereka secara mandiri. Ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial banyak penerima bantuan lebih memilih mengandalkan bantuan dari pemerintah daripada berusaha meningkatkan penghasilan sendiri. Misalnya, ada warga yang menerima bantuan tunai setiap bulan, tetapi tidak mencoba mencari pekerjaan tambahan atau memanfaatkan peluang usaha karena merasa cukup dengan bantuan yang diberikan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa PKH tidak sepenuhnya mendorong kemandirian ekonomi, melainkan justru menciptakan mentalitas ketergantungan.

Selain itu, permasalahan lain yang sering terjadi adalah ketidaktepatan sasaran dalam pendistribusian bantuan. Faktor administrasi dan pendataan yang kurang akurat menjadi kendala dalam memastikan bahwa PKH benar-benar diterima oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Beberapa warga yang seharusnya mendapatkan bantuan justru tidak terdaftar sebagai penerima, sementara ada pula yang lebih mampu tetapi tetap menerima manfaat dari program ini.

Tantangan lainnya adalah efektivitas bantuan dalam meningkatkan kesejahteraan jangka panjang. Meskipun bantuan diberikan secara berkala, tidak semua penerima mampu memanfaatkannya untuk investasi jangka panjang seperti pendidikan anak atau peningkatan usaha ekonomi produktif. Program Keluarga Harapan (PKH) sebenarnya dirancang bukan hanya untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong mereka keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, banyak keluarga penerima bantuan PKH yang lebih cenderung menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti membeli bahan pokok dan

keperluan rumah tangga, daripada memanfaatkannya sebagai modal untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka dalam jangka panjang.

KAJIAN TEORI

Teori Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan konsep yang bersifat multidimensional dan mencakup berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan. Kesejahteraan menurut *United Nations Development Program* (UNDP): Kesejahteraan didefinisikan sebagai kemampuan untuk memperluas pilihan-pilihan dalam hidup, antara lain dengan memasukkan penilaian adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan publik (UNDP 2022).

Beberapa teori yang umum digunakan dalam memahami konsep kesejahteraan antara lain sebagai berikut:

1. Teori *Utilitarian*

Teori *Utilitarian* merupakan suatu teori etika yang menekankan bahwa kebaikan atau nilai moral suatu tindakan ditentukan berdasarkan sejauh mana tindakan tersebut menghasilkan manfaat atau kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang (Mill, 2020). Dalam konteks ini, keputusan atau kebijakan dinilai baik apabila memberikan dampak positif yang lebih besar dibandingkan dampak negatifnya. Teori ini dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, yang berpendapat bahwa tujuan akhir dari segala tindakan adalah tercapainya kesejahteraan bersama. Dengan demikian, utilitarianisme menempatkan pertimbangan hasil akhir sebagai dasar utama dalam menilai benar atau salahnya suatu tindakan.

2. Teori Kebutuhan Dasar (*Basic Needs Theory*)

Teori Kebutuhan Dasar (*Basic Needs Theory*) merupakan pendekatan dalam ilmu ekonomi dan pembangunan yang menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan minimum masyarakat sebagai prasyarat untuk mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi. Teori ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja yang layak (Imelda 2025). Menurut teori ini, keberhasilan suatu program atau kebijakan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi. Pendekatan ini dikembangkan sebagai respons terhadap ketimpangan hasil pembangunan dan bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial melalui pemenuhan hak-hak dasar setiap individu

3. Teori Kemampuan (*Capability Approach*)

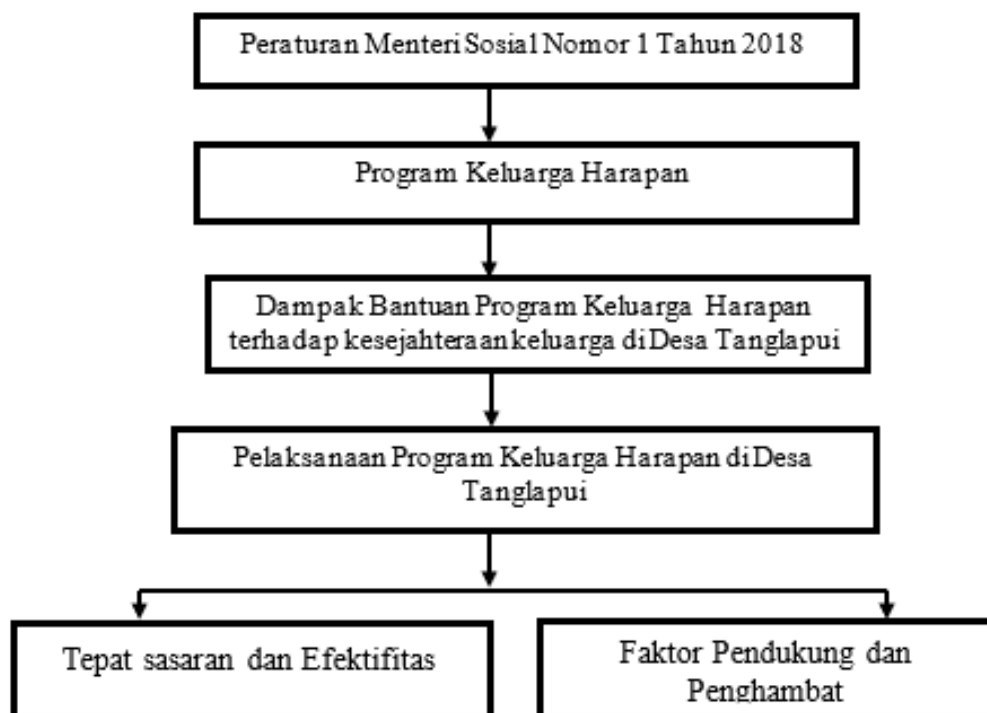
Teori Kemampuan (*Capability Approach*) adalah pendekatan dalam kajian kesejahteraan yang dikembangkan oleh Amartya Sen, yang menekankan pentingnya memperluas kebebasan individu untuk mencapai kehidupan yang mereka nilai berharga. Teori ini berfokus bukan hanya pada hasil ekonomi atau sumber daya yang dimiliki seseorang, tetapi pada kemampuan nyata individu untuk memilih dan menjalani kehidupan sesuai dengan keinginannya (Gumelar, 2025). Dalam konteks ini, kesejahteraan diukur berdasarkan sejauh mana individu memiliki kesempatan yang riil (*capabilities*) untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengembangkan potensinya. Pendekatan ini memandang bahwa pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang memperluas pilihan hidup dan kebebasan masyarakat

Konsep Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi adalah bagian dari kesejahteraan sosial yang dapat dikaitkan secara langsung maupun tidak langsung dengan pengukuran uang atau merupakan bagian dari kesejahteraan sosial itu sendiri. Kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat (Nur Aeda, 2022).

Kerangka Berpikir

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 mengatur pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Program ini dirancang untuk memberikan bantuan sosial kepada keluarga yang tergolong kurang mampu, dengan harapan dapat meningkatkan akses mereka terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi. Di Desa Tanglapui, implementasi PKH menjadi sangat penting, mengingat banyaknya keluarga yang masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran dan berkelanjutan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi keluarga penerima manfaat, sehingga mereka dapat keluar dari jeratan kemiskinan.



Sumber: Peneliti, 2025

Gambar 2.
Kerangka Berpikir

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus dimana peneliti mengumpulkan informasi di lapangan secara menyeluruh untuk memahami dampak Program Keluarga Harapan yang ada di Desa Tanglapui. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, peneliti berusaha mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk wawancara dengan pemerintah desa, masyarakat penerima program PKH, Pendamping PKH, dan Tokoh Masyarakat observasi langsung di lapangan, dan analisis dampak Program Keluarga Harapan terhadap masyarakat. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketepatan Sasaran dan Efektivitas

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) diukur keberhasilannya tidak hanya dari jumlah dana bantuan yang disalurkan, tetapi juga dari sejauh mana program ini tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin. Teori implementasi kebijakan menurut Edward III dalam (Posumah 2023) menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Dalam konteks PKH di Desa Tanglapui, dua hal utama yang menjadi fokus pembahasan adalah ketepatan sasaran dan efektivitas pelaksanaan program.

Ketepatan Sasaran

Dari hasil wawancara di lapangan, masih ditemukan beberapa permasalahan di tingkat pelaksanaan, yaitu belum maksimalnya proses pemutakhiran data. Akibatnya, terdapat keluarga yang sudah tidak memenuhi kriteria namun masih menerima bantuan, dan sebaliknya, keluarga yang seharusnya layak tetapi belum terdaftar dalam program. Permasalahan ini menunjukkan belum optimalnya sistem pendataan dan pengawasan sebagai bagian dari struktur birokrasi dalam pelaksanaan program.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Rachma et al. 2022) menyatakan bahwa kendala dalam pemutakhiran data menyebabkan ketidaktepatan sasaran dalam pelaksanaan PKH, karena proses verifikasi tidak dilakukan secara berkala, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan data sosial.

Oleh karena itu, dari aspek ketepatan sasaran, pelaksanaan PKH di Desa Tanglapui sudah cukup baik dalam menyasar keluarga miskin, tetapi masih menghadapi hambatan dalam hal keakuratan dan keadilan data. Jika proses pendataan dan validasi dapat diperbaiki secara berkala dan partisipatif, maka sasaran program akan semakin tepat dan menjangkau keluarga miskin yang benar-benar membutuhkan.

Efektivitas Pelaksanaan

Efektivitas pelaksanaan program mengacu pada sejauh mana program PKH mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui intervensi pada sektor pendidikan dan kesehatan. Dalam praktiknya di Desa Tanglapui, efektivitas program belum berjalan maksimal. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan hal ini terlihat dari perilaku sebagian besar penerima manfaat yang masih menggunakan dana

bantuan untuk kebutuhan konsumtif, seperti belanja harian, acara adat, atau pelunasan utang, bukan untuk keperluan pendidikan dan kesehatan anak.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pendamping PKH belum mampu mengubah cara pandang sebagian masyarakat terhadap esensi program. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam kegiatan pertemuan kelompok juga masih rendah, sehingga informasi mengenai hak dan kewajiban sebagai penerima belum dipahami sepenuhnya.

Menurut hasil penelitian (Arlayati and Ikhwan 2025) efektivitas PKH sangat bergantung pada pemahaman penerima terhadap syarat dan tujuan program. Jika komunikasi hanya bersifat satu arah dan partisipasi KPM rendah, maka bantuan cenderung tidak dimanfaatkan sesuai harapan dan tidak berdampak signifikan terhadap perubahan sosial ekonomi keluarga.

Menurut teori Edward III dalam (Tawai and Johanis 2025), hambatan ini berkaitan dengan lemahnya aspek komunikasi dan disposisi. Meski pelaksana program (pendamping) telah menjalankan tugas sosialisasi, kurangnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan sumber daya menjadi tantangan besar dalam mewujudkan efektivitas program. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi, pengawasan, serta pendekatan kultural yang lebih relevan agar tujuan dari program PKH benar-benar tercapai.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Program di Desa Tanglapui

Pelaksanaan kebijakan publik pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor di tingkat implementasi. Teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III menyebutkan bahwa terdapat empat faktor utama yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu implementasi kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Di sisi lain, Van Meter dan Van Horn menambahkan dimensi sosial, ekonomi, serta karakteristik pelaksana dan masyarakat penerima kebijakan sebagai faktor yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan kebijakan.

Dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tanglapui, terdapat sejumlah faktor yang secara nyata mendukung pelaksanaan program, namun tidak sedikit pula faktor penghambat yang membuat pencapaian tujuan program belum optimal.

Faktor Pendukung Pelaksanaan program PKH di Desa Tanglapui

1. Dukungan dari Pemerintah Desa

Dukungan dari pemerintah desa merupakan salah satu faktor pendukung yang signifikan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di tingkat lokal. Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator utama dalam berbagai tahapan pelaksanaan program, mulai dari proses verifikasi dan validasi data, pendampingan teknis, hingga membantu pelaksanaan kegiatan kelompok dan sosialisasi kepada masyarakat. Keterlibatan aktif aparatur desa menunjukkan adanya sinergi kelembagaan antara pelaksana program dan pemerintah setempat dalam menjamin keberhasilan program di tingkat akar rumput. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa pelaksana PKH di tingkat desa harus bekerja sama dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa keterlibatan pemerintah desa di Desa Tanglapui telah memperkuat struktur birokrasi lokal yang mendukung keberlangsungan dan efektivitas program. Hal ini sesuai dengan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, yang menekankan bahwa struktur birokrasi,

termasuk pembagian peran yang jelas dan koordinasi lintas pelaksana, merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Koordinasi horizontal antara pendamping PKH dan pemerintah desa menciptakan sistem pelaksanaan yang lebih tertib, responsif, dan adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Daely et al., (2025) yang menunjukkan bahwa dukungan aktif pemerintah desa dalam pelaksanaan PKH, khususnya dalam proses verifikasi data dan pendampingan teknis di lapangan, berkontribusi besar terhadap efektivitas program. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa keterlibatan kepala desa dan perangkatnya mempermudah komunikasi antara pendamping dan masyarakat, serta mempercepat penyelesaian masalah di tingkat lokal.

2. Kinerja Pendamping PKH yang Aktif

Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tanglapui telah menunjukkan pelaksanaan tugas yang sesuai dengan ketentuan program sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018. Hal ini terlihat dari berbagai kegiatan yang dilakukan, seperti verifikasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM), penyelenggaraan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), serta koordinasi aktif dengan pihak sekolah dan puskesmas setempat. Kegiatan-kegiatan ini mencerminkan bentuk nyata dari aspek komunikasi dan disposisi pelaksana sebagaimana dijelaskan dalam teori implementasi kebijakan Edward III. Dalam konteks ini, komunikasi yang dimaksud tidak hanya mencakup penyampaian informasi kepada KPM melalui P2K2, tetapi juga membangun hubungan koordinatif antara pelaksana dan lembaga pelayanan publik lainnya demi mendukung tujuan program. Selain itu, disposisi atau sikap pendamping terhadap pelaksanaan program juga dapat dinilai positif, mengingat mereka menjalankan tugas secara rutin, konsisten, dan dengan komitmen tinggi terhadap keberhasilan program.

Lebih lanjut, jika dikaji dari perspektif Van Meter dan Van Horn, pendamping PKH di Desa Tanglapui menunjukkan karakteristik agen pelaksana yang baik. Mereka tidak hanya memahami tugas dan fungsi mereka dalam konteks program, tetapi juga mampu menjalin kerja sama dengan berbagai pihak terkait yang mendukung kelancaran implementasi kebijakan di tingkat lokal.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mario et al., (2025) dalam penelitiannya mereka menyimpulkan bahwa keterlibatan pendamping sosial yang aktif dan komunikatif merupakan faktor dominan dalam efektivitas pelaksanaan PKH.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari sisi pelaksana program, pendamping PKH di Desa Tanglapui telah menjalankan peran sesuai teori implementasi yang berlaku. Oleh karena itu, hambatan yang terjadi dalam efektivitas program PKH di desa ini bukan berasal dari lemahnya pelaksana, melainkan lebih kepada faktor lain seperti validitas data penerima serta tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan bantuan sesuai dengan tujuan program.

3. Koordinasi Antar Lembaga

Koordinasi antara pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), pihak sekolah, dan petugas kesehatan di puskesmas merupakan komponen penting dalam menjamin terpenuhinya syarat-syarat komponen pendidikan dan kesehatan yang menjadi dasar pemberian bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Ketiga pihak ini memiliki peran saling terkait dalam memastikan bahwa anak-anak KPM hadir di sekolah secara rutin dan memperoleh layanan kesehatan dasar sesuai ketentuan program.

Koordinasi lintas sektor ini mencerminkan bentuk nyata dari komunikasi antar organisasi pelaksana, yang dalam teori implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van

Horn disebut sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana para aktor pelaksana memiliki keselarasan tindakan, informasi, dan tujuan.

Dengan koordinasi yang baik, proses verifikasi terhadap pemenuhan kewajiban KPM dapat dilakukan secara lebih efektif dan akurat. Hal ini juga memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan program di tingkat lokal. Sebaliknya, apabila koordinasi antar pelaksana lemah, maka akan terjadi ketidaksesuaian data, keterlambatan laporan, serta potensi terjadinya kesalahan dalam proses evaluasi kepatuhan KPM terhadap persyaratan program.

Oleh karena itu, penguatan koordinasi antar pelaksana harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan PKH di tingkat desa. Pengembangan mekanisme kerja terpadu, seperti forum koordinasi rutin atau sistem pelaporan terpadu, dapat menjadi strategi untuk meningkatkan efektivitas pemantauan dan pencapaian tujuan program secara keseluruhan.

4. Kesadaran Sebagian KPM terhadap Tujuan Program

Meskipun belum merata, sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Tanglapui telah menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai tujuan Program Keluarga Harapan (PKH). Mereka memahami bahwa bantuan yang diterima tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi diarahkan untuk mendukung kebutuhan dasar, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Dalam praktiknya, bantuan tersebut telah digunakan untuk memenuhi keperluan sekolah anak maupun pengobatan dasar keluarga.

Fenomena ini mencerminkan adanya peningkatan kesadaran di kalangan sebagian penerima manfaat terhadap nilai dan maksud dari program bantuan bersyarat. Kesadaran ini merupakan bagian dari aspek disposisi, sebagaimana dijelaskan dalam teori implementasi kebijakan oleh George C. Edward III, yang menekankan pentingnya sikap dan pemahaman aktor pelaksana maupun penerima dalam mendukung keberhasilan suatu kebijakan.

Kemajuan ini menunjukkan bahwa proses internalisasi nilai-nilai program mulai terjadi, meskipun belum menyeluruh. Artinya, sebagian masyarakat telah mengalami perubahan pola pikir dan mulai mengarahkan penggunaan bantuan sesuai dengan tujuan program. Dengan terus mendorong peningkatan pemahaman melalui kegiatan edukatif yang berkelanjutan, maka efektivitas jangka panjang dari program PKH dapat semakin ditingkatkan. Peningkatan aspek disposisi ini menjadi indikator bahwa program mulai diterima secara substantif oleh masyarakat, bukan hanya secara administratif.

Faktor Penghambat Pelaksanaan program PKH di Desa Tanglapui

1. Pemahaman Masyarakat terhadap Tujuan Program

Salah satu kendala dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tanglapui adalah rendahnya pemahaman sebagian besar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap tujuan program. Banyak penerima belum sepenuhnya menyadari bahwa bantuan PKH bersifat bersyarat dan dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Kondisi ini berdampak pada pola pemanfaatan bantuan yang masih cenderung konsumtif, seperti digunakan untuk memenuhi kebutuhan pesta adat, melunasi utang, atau keperluan lain yang tidak terkait dengan tujuan program.

Kurangnya pemahaman ini mencerminkan bahwa proses komunikasi dan penyampaian informasi dari pelaksana program belum sepenuhnya efektif dalam membentuk kesadaran

dan perilaku KPM sesuai dengan arah kebijakan. Akibatnya, bantuan yang seharusnya menjadi instrumen peningkatan kualitas sumber daya manusia justru belum memberikan dampak optimal terhadap kesejahteraan jangka panjang keluarga penerima.

Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu dilakukan penguatan strategi komunikasi program melalui pendekatan yang lebih partisipatif dan kontekstual. Pemerintah desa bersama pendamping PKH dapat menyelenggarakan kegiatan peningkatan pemahaman, seperti sosialisasi tematik atau forum diskusi keluarga, yang menjelaskan kembali makna bantuan bersyarat dan pentingnya pengalokasian dana sesuai dengan sasaran program. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa manfaat PKH tidak hanya diterima secara nominal, tetapi juga dipahami dan dimanfaatkan secara tepat oleh masyarakat.

2. Partisipasi Rendah dalam Kegiatan Sosialisasi

Rendahnya tingkat partisipasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam kegiatan pertemuan kelompok menjadi salah satu hambatan dalam penyampaian informasi dan edukasi mengenai Program Keluarga Harapan (PKH). Pertemuan kelompok, yang seharusnya berfungsi sebagai media sosialisasi mengenai hak, kewajiban, serta mekanisme pelaksanaan program, sering kali diabaikan atau tidak dihadiri oleh sebagian besar penerima bantuan. Kondisi ini menyebabkan penyampaian informasi menjadi tidak merata dan menimbulkan kesenjangan pemahaman di kalangan KPM.

Dalam perspektif implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, aspek komunikasi dan disposisi (sikap pelaksana dan sasaran kebijakan) sangat menentukan efektivitas implementasi suatu program. Rendahnya kehadiran KPM mengindikasikan bahwa informasi yang disampaikan tidak diterima secara utuh, atau bahwa penyampaian informasi tidak dilakukan dengan pendekatan yang tepat. Selain itu, hal ini juga mencerminkan adanya kelemahan dalam membangun komitmen dari kedua belah pihak, baik pelaksana program maupun masyarakat penerima.

Untuk mengatasi hambatan ini, perlu dirancang pendekatan komunikasi yang lebih partisipatif, interaktif, dan kontekstual. Misalnya, pendamping PKH dapat menjadwalkan pertemuan pada waktu yang fleksibel sesuai kondisi masyarakat atau mengintegrasikan edukasi program dalam kegiatan sosial-keagamaan masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan aktif KPM serta memperkuat pemahaman mereka terhadap substansi program PKH secara menyeluruh.

3. Belum Optimalnya Pembaruan Data

Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tanglapui adalah tidak dilakukannya pembaruan data penerima secara rutin. Masih ditemukan keluarga yang secara ekonomi telah mengalami perbaikan namun tetap tercatat sebagai penerima bantuan, sementara keluarga lain yang lebih membutuhkan justru tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ketidaktepatan ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam proses verifikasi dan validasi data, yang seharusnya menjadi dasar utama dalam penentuan sasaran program.

Menurut teori implementasi kebijakan oleh George C. Edward III, aspek struktur birokrasi memainkan peran penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik. Dalam hal ini, struktur birokrasi yang tidak responsif dan lambat dalam memperbarui data menyebabkan distribusi bantuan menjadi tidak adil dan tidak tepat sasaran. Selain itu, keterbatasan koordinasi antara pemerintah desa, pendamping sosial, dan instansi terkait di tingkat kabupaten juga turut memperlambat proses validasi dan pemutakhiran data.

Masalah ini berpotensi menurunkan legitimasi program di mata masyarakat serta menciptakan ketimpangan sosial di tingkat lokal. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme

pembaruan data yang lebih transparan, akurat, dan partisipatif, misalnya melalui verifikasi lapangan secara berkala, pelibatan tokoh masyarakat dalam validasi, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data DTKS. Reformasi kecil pada proses ini akan sangat menentukan efektivitas penyaluran bantuan sosial secara keseluruhan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Tepat Sasaran dan Efektifitas PKH di Desa Tanglapui

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tanglapui sudah cukup tepat sasaran karena mayoritas penerima bantuan merupakan keluarga miskin dengan keterbatasan ekonomi. Namun, efektivitas program belum sepenuhnya optimal. Sebagian penerima masih memanfaatkan bantuan hanya untuk kebutuhan konsumtif sehari-hari, bukan untuk investasi jangka panjang seperti pendidikan atau usaha produktif. Selain itu, masih terdapat kasus penerima yang secara ekonomi sudah lebih baik namun tetap tercatat sebagai penerima, sementara keluarga lain yang lebih layak belum terakomodasi. Hal ini menunjukkan bahwa aspek efektivitas dan keberlanjutan program masih perlu ditingkatkan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan PKH di Desa Tanglapui

Faktor pendukung utama adalah adanya pendamping sosial yang aktif melakukan pembinaan, dukungan pemerintah desa dalam proses administrasi dan validasi data, serta adanya antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan bantuan terutama untuk pendidikan dan kesehatan anak. Adapun faktor penghambatnya meliputi keterlambatan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), keterbatasan infrastruktur desa yang memperlambat akses komunikasi dan informasi, serta rendahnya pemahaman sebagian penerima manfaat mengenai tujuan PKH sehingga penggunaan bantuan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan program

Saran

1. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi pembangunan, khususnya dalam memahami pelaksanaan program bantuan sosial di wilayah desa tertinggal. Melalui hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya pengetahuan tentang bagaimana Program Keluarga Harapan (PKH) berperan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini telah memberikan dampak positif terhadap akses pendidikan dan kesehatan keluarga penerima, meskipun masih terdapat kendala dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memperkuat pemahaman mengenai efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan.

2. KPM

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diharapkan lebih aktif mengikuti kegiatan pembinaan dan edukasi seperti pertemuan Kelompok. Keterlibatan dalam kegiatan ini penting untuk menumbuhkan pemahaman yang menyeluruh terhadap tujuan program

PKH, yaitu bukan hanya sebagai bantuan tunai, tetapi sebagai upaya peningkatan kualitas hidup melalui akses pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, KPM juga perlu menggunakan bantuan yang diterima secara bijak dan sesuai dengan peruntukannya. Prioritas penggunaan sebaiknya diarahkan untuk mendukung kebutuhan anak, seperti perlengkapan sekolah dan layanan kesehatan, agar tujuan jangka panjang program dalam meningkatkan sumber daya manusia dapat tercapai.

3. Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti berikutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian, baik dari segi wilayah maupun jumlah informan, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH). Penelitian dapat melibatkan lebih banyak pihak, misalnya aparat desa, pendamping PKH dari kecamatan, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, maupun masyarakat umum sebagai kontrol sosial.

Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan metode penelitian yang berbeda, seperti pendekatan kuantitatif atau *mixed methods*, sehingga mampu mengukur secara lebih objektif dampak PKH terhadap tingkat kesejahteraan keluarga, misalnya melalui indikator pendidikan, kesehatan, dan tingkat pendapatan rumah tangga. Penelitian menyeluruh antar desa atau antar daerah juga bisa dilakukan untuk mengetahui perbedaan efektivitas program di wilayah dengan kondisi geografis dan sosial ekonomi yang berbeda

DAFTAR RUJUKAN

- Arlayati, Arlayati, and Ikhwan Ikhwan. 2025. "Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Bagi Masyarakat Di Kelurahan Sungai Sapih." 8(1): 187–99.
- BPS kab Alor. 2024. "Tingkat Kemiskinan Kabupaten Alor Maret 2024 - Badan Pusat Statistik Kabupaten Alor." <https://alorkab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/11/05/118/tingkat-kemiskinan-kabupaten-alor-maret-2024.html> (July 18, 2025).
- Daely, Victoria Grace et al. 2025. "Analisis Efektivitas Distribusi Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sampali , Kecamatan Percut Sei Tuan." 9: 16107–10.
- Gumelar, Shidiq, and Subaidi Qomar. 2025. "Pembangunan Berbasis Kebebasan Amartya Sen : Konsep Dan Implikasi Terhadap Pembangunan Di Indonesia." 2(April).
- Imelda, Fatwa. 2025. *No Title*. EUREKA MEDIA AKSARA, JANUARI 2025 ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH NO. 225/JTE/2021.
- Kementerian Desa. 2024. "IDM : Indeks Desa Membangun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi." <https://idm.kemendesa.go.id/view/detil/3/publikasi> (August 13, 2025).
- Kementerian Sosial. 2025. "Program Keluarga Harapan." <https://kemensos.go.id/program-bantuan-sosial/pkh> (July 18, 2025).
- Nur Aeda, and Riadul Jannah. 2022. "Implementasi Dan Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. Studi Di Desa Kekait Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat." *Journal of Economics and Business* 8(1): 165–86.
- Posumah, Johnny H. 2023. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM MENANGANI

- KEKACAUAN ANTAR DESA DI KECAMATAN TOMPASO BARU
KABUPATEN MINAHASASELATAN.”IX(3):339–50.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/download/47478/42624/124717>
- Rachma, Maulida, Yusuf Hidayat, Laila Azkia, and Fakultas Keguruan. 2022. “Hambatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di Kelurahan Pelambuan Kota Banjarmasin.” 4(2): 93–104.
- Tawai, Adrian, and Ariel Putra Johanis. 2025. “Implementasi Kebijakan : Analisis Program Keluarga Harapan (PKH) Dengan Model Edward III.” 4(3): 479–91.
- UNDP. 2022. “Goal 3: Good Health and Well-Being | Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa.”<https://www.undp.org/sustainable-development-goals/good-health> (July 22, 2025).